

digunakan untuk menegakkan keadilan dan melindungi rakyat. Sebaliknya, ukuran kejujuran ulama bukanlah seberapa dekat ia dengan penguasa, melainkan sejauh mana ia tetap berpegang pada kebenaran ketika berhadapan dengan kekuasaan.

Ulama dan penguasa hendaknya menjadi mitra dalam menegakkan keadilan, bukan mitra dalam membenarkan kezaliman. Sebabnya, kekuasaan tanpa nasihat dapat kehilangan arah, sementara ilmu tanpa keberanian menyampaikan kebenaran dapat kehilangan fungsi sosialnya. Keduanya harus saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran, agar amanah yang diberikan Allah SWT tidak berubah menjadi sarana kezaliman.

Dalam hal ini, Imam al-Ghazali telah mengingatkan adanya hubungan kerusakan penguasa dengan

kerusakan ulama, terutama ketika para ulama telah dikuasai kecintaan terhadap harta dan kedudukan sehingga tidak lagi berani melakukan koreksi terhadap penguasa. Beliau menyatakan:

«فَقَسَادُ الرَّعَايَا بِفَسَادِ الْمُلُوكِ وَقَسَادُ الْمُلُوكِ بِفَسَادِ الْعُلَمَاءِ وَقَسَادُ الْعُلَمَاءِ بِاسْتِيلَاءِ حُبِّ الْمَالِ وَالْهَوَا»

Kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para penguasa. Kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan para ulama. Kerusakan ulama terjadi ketika mereka dikuasai oleh kecintaan terhadap harta dan kedudukan (Al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn*, 2/357).

Dengan demikian para ulama memiliki tanggung jawab moral untuk memperbaiki penguasa yang rusak. Kerusakan penguasa adalah saat mereka melakukan kezaliman. Kezaliman terbesar penguasa adalah saat mereka enggan ber hukum dengan

hukum-hukum Allah SWT. Demikian sebagaimana yang Allah SWT tegaskan:

«وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»

Siapa saja yang tidak ber hukum menurut wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itulah kaum yang zalim (TQS al-Ma'idah [5]: 45).

Alhasil, sejatinya para ulamalah yang paling bertanggung jawab untuk menasihati dan mengingatkan penguasa agar bersegera menerapkan syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Jika tidak maka jelaslah, sebagaimana kata Imam al-Ghazali, para ulama adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusakan penguasa, sebagaimana saat ini, karena enggan ber hukum dengan hukum-hukum Allah SWT.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []

Hikmah

Allah SWT berfirman:

«...إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ...»

...Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara para hamba-Nya adalah para ulama...

(TQS Fathir [35]: 28). []

Buletin Dakwah **KAFFAH**, terbit setiap Jum'at. **Penerbit:** Lembaga Kajian Islam Kaffah. **Alamat:** Menara Hijau, Lantai 7 - Suite 702, Jl. MT. Haryono Kav. 33, RT.03/RW.02, Kel. Cikokol, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan - 12770.

Marketing: Mursyid Aziz 08787-444-1924 (WA/SMS only). **Infak** Rp. 300/eks. Pemesanan minimal 100 eks

Simpan baik-baik lembaran ini, di dalamnya ada ayat-ayat al-Quran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ULAMA WAJIB MENGOREKSI PENGUASA

PADA Sabtu, 19 September 2026, dalam Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, KH Hasan Abdullah Sahal, menyampaikan sambutan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya, Kiai Hasan, antara lain, menyinggung fenomena “cari muka” hingga “cari jabatan” serta menegaskan prinsip kesederhanaan dalam kehidupan pimpinan pesantren. Beliau juga menyatakan bahwa jika makanan, pakaian, kendaraan, atau rumahnya melebihi apa yang dimiliki para santri, maka dirinya boleh diprotes, dikritik bahkan didemo (DetikJatim, 19/09/ 2026).

Pernyataan Kiai Hasan

tersebut penting direnungkan. Pasalnya, beliau sesungguhnya bukan sekadar berbicara tentang kesederhanaan seorang pimpinan pesantren, tetapi juga menjelaskan sebuah prinsip kepemimpinan secara umum, yakni: seseorang yang memegang amanah kepemimpinan (termasuk kepemimpinan negara, red.) tidak semestinya menutup pintu kritik terhadap dirinya.

Penguasa Jangan Anti Kritik

Sebagaimana diketahui, kekuasaan adalah amanah yang Allah SWT titipkan kepada seorang penguasa. Penguasa adalah manusia biasa yang bisa keliru. Karena itu penguasa tidak semestinya menganggap dirinya berada di atas nasihat dan koreksi.

Itulah yang ditunjukkan,

antara lain, oleh Sayidina Abu Bakar ash-Shiddiq ra. Dalam pidato awal Kekhalifahannya, beliau tegas menyampaikan:

«فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِيزُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي»

Jika aku berbuat baik, bantulah aku. Jika aku berbuat buruk, luruskanlah aku (M. Husain Haikal, *Hayâh Muhammad saw.*, 1/97).

Pesan tersebut menunjukkan prinsip penting dalam etika kepemimpinan, yakni: pemimpin tidak boleh menempatkan dirinya di atas

Waktu Zhuhur

14 Rabiul Akhir 1448 H/
25 September 2026 M
Untuk Jakarta & Sekitarnya

11.48 WIB

Tidak dibaca saat khatib sedang khutbah

kebenaran. Kritik yang benar seharusnya diterima dengan lapang dada, sedangkan kritik yang keliru dapat dibantah dengan argumentasi.

Ulama Bukan Stempel Kekuasaan

Di sisi lain, ulama bukanlah stempel kekuasaan. Kemuliaan ulama terletak pada ilmu, ketakwaan dan kesediaannya menyampaikan kebenaran. Terutama di hadapan penguasa. Karena itu ulama tidak semestinya membenarkan seluruh kebijakan penguasa tanpa pemeriksaan. Jika penguasa terbukti menyimpang, ulama wajib mengoreksi dan meluruskan penguasa tersebut.

Allah SWT berfirman:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾
Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan kebajikan dan melakukan amar makruf nahi mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung (TQS Ali 'Imran [3]: 104).

Perintah amar makruf nahi mungkar ini ditujukan kepada pihak-pihak yang melakukan kesalahan, termasuk penguasa. Apalagi Rasulullah saw. telah bersabda:

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ»

“Agama adalah nasihat.”

Para Sahabat bertanya, “Untuk siapa?” Beliau menjawab:

«لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»

“Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum Muslim dan seluruh kaum Muslim.” (HR Muslim).

Hadis tersebut secara jelas menyebut para pemimpin kaum Muslim sebagai salah satu pihak yang menjadi sasaran nasihat. Nasihat dapat berupa bimbingan, peringatan, koreksi dan ajakan untuk menjalankan amanah sesuai dengan syariah Allah SWT (An-Nawawi, *Al-Minhâj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, syarah hadis no. 55).

Rasulullah saw. juga bersabda:

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»

Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, dengan lisannya. Jika tidak mampu, dengan hatinya. Yang demikian adalah selemah-lemahnya iman (HR Muslim).

Hadis ini menjadi dasar kewajiban mengingkari kemungkaran. Siapa pun pelakunya. Penguasa tidak dikecualikan dari sasaran kewajiban tersebut. Bahkan karena keputusan penguasa dapat memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas, koreksi terhadap kebijakan penguasa yang zalim atau bertentangan dengan syariah memiliki urgensi yang besar. Karena itulah Rasulullah saw. pun bersabda:

«أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»

Jihad yang paling utama adalah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa zalim (HR Ahmad).

Hadis tersebut menunjukkan tingginya kedudukan keberanian moral dalam menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang melakukan kezaliman.

Teladan Ulama

Sejarah Islam memberikan pelajaran bahwa nasihat dan koreksi kepada penguasa bukanlah perkara asing dalam tradisi ulama salaf. Bahkan ketika para penguasa menerapkan syariah Islam, kewajiban amar makruf nahi mungkar tetap berlaku. Penerapan syariah Islam oleh penguasa tidak menghapus kebutuhan terhadap

pengawasan, koreksi dan nasihat. Sebabnya, penguasa adalah manusia yang tetap memiliki kemungkinan melakukan kesalahan dan penyimpangan.

Di antara kisah yang sering dikemukakan adalah riwayat tentang seorang perempuan Muslimah yang mengoreksi kebijakan Khalifah Umar bin al-Khatthab ra. mengenai pembatasan mahar yang ia pandang keliru (Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, 5/95; tafsir QS an-Nisa [4]: 20).

Kisah lainnya banyak sekali. Misalnya saja kisah Imam Hasan al-Bashri *rahimahulLâh*. Beliau adalah salah seorang di antara para ulama yang begitu besar rasa takutnya kepada Allah SWT. akan tetapi, beliau tak pernah gentar terhadap penguasa dunia yang lalim. Beliau berani menentang Hajaj bin Yusuf ats-Tsaqafi, penguasa Irak yang lalim pada zamannya. Beliau berani mengungkap keburukan perilaku penguasa tersebut di hadapan rakyat dan menyampaikan kebenaran di hadapannya. Beliau sangat terkenal dengan ucapannya, “*Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari para ulama untuk menjelaskan ilmu yang mereka miliki kepada manusia dan tidak menyembunyikan ilmu mereka.*”

Demikian pula Sufyan ats-Tsauri *rahimahulLâh*. Rasa takutnya kepada Allah SWT begitu besar. Akan tetapi, keberaniannya terhadap penguasa lalim pun tak diragukan. Beliau pernah menentang penguasa Abu Ja'far al-Manshur ketika dia mendanai dirinya dan para pengikutnya yang beribadah haji ke Baitul-Haram dalam jumlah yang sangat besar. Pasalnya, dana tersebut diambil dari Baitul Mal milik kaum Muslim.

Dalam riwayat lain disebutkan, suatu ketika Khalifah Muawiyah hendak memulai pidatonya. Saat itu Abu Muslim al-Khauilani segera berdiri dan berkata bahwa ia tidak mau mendengar dan menaati Khalifah. Ketika ditanya alasannya, beliau menjawab, “*Karena engkau telah berani memutuskan bantuan kepada kaum Muslim. Padahal harta itu bukan hasil keringatmu dan bukan harta ayah-ibumu.*” (Lihat: *Al-Badri, Al-Islâm bayna al-'Ulamaa' wa al-Hukâm*, hlm. 101).

Ulama Adalah Mitra Penguasa dalam Menegakkan Keadilan

Ulama dan penguasa seharusnya membangun hubungan yang dilandasi ketakwaan dan tanggung jawab. Bukan hubungan yang menjadikan ulama sebagai stempel membenaran bagi seluruh

kebijakan penguasa. Penguasa membutuhkan ulama yang berilmu, jujur dan berani menyampaikan kebenaran. Sebaliknya, ulama membutuhkan ruang untuk menasihati, mengoreksi dan mengingatkan penguasa tanpa harus kehilangan kebebasan menyampaikan perkara yang haq.

Kemitraan keduanya akan memiliki makna jika diarahkan pada tujuan yang sama: sama-sama mencari ridha Allah SWT. Penguasa tidak boleh menjadikan kekuasaan sebagai sarana kesombongannya. Sebaliknya, ulama tidak boleh menjadikan ilmu sebagai alat untuk mencari kedudukan atau keuntungan duniawi. Keduanya harus memahami bahwa amanah kekuasaan dan amanah ilmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Karena itu kritik yang benar tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman. Nasihat yang disampaikan dengan ikhlas tidak sepatutnya dibalas dengan penghinaan. Ulama tidak boleh meninggalkan kewajiban amar makruf nahi mungkar hanya karena pihak yang dinasihati adalah penguasa.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kekuasaan bukanlah seberapa sering penguasa dipuji, melainkan sejauh mana amanah kekuasaan